

**PERAN SATUAN TUGAS KOMISI PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS DI KOTA BANJAR
(Studi Analisis Di Kecamatan Banjar Kota Banjar)**

Gilang Ramadhan

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: madha027@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis hasil dari pengamatan yang di lakukan pada kantor KPA Kota Banjar di peroleh adanya gambaran tentang hasil dari pelaksanaan peran satuan tugas Komisi Penanggulangan Aids yang belum terlaksana dengan baik, hal itu bisa di lihat dari adanya beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana peran Satgas Komisi Penanggulangan Aids dalam upaya pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di Kecamatan Banjar Kota Banjar? 2) Hambatan apa saja yang di hadapi di lapangan dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di Kecamatan Banjar Kota Banjar?3) Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan, dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di Kecamatan Banjar Kota Banjar?Metode penelitian pada dasarnya meupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini informan sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 Pengelola Program Komisi Penanggulangan Aids , 1 Pengelola adm dan keuangan Komisi Penanggulangan Aids, 3 ODHA(Orang dengan Hiv Aids),2 masyarakat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dapat disimpulkan bahwa :Peran Satuan Tugas Komisi Penanggulangan Aids belum berjalan secara optimal. Berdasarkan dari Lima dimensi mengenai peran satuan tugas komisi penanggulangan aids menurut Soekanto (2009:212-213) terdiri dari Peran sebagai suatu kebijakan, Peran sebagai strategi, Peran sebagai alat komunikasi, Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, Peran sebagai terapi. Terdapat 2 dimensi yang belum berjalan dengan baik yaitu dimensi peran sebagai suatu kebijakan dan peran sebagai terapi. Selanjutnya hambatan yang ditemui adalah masih kurangnya sosialisasi kebijakan tentang penanggulangan Hiv/Aids terhadap masyarakat karena terkendala anggaran apalagi di dua tahun terakhir, para pengidap cenderung acuh dan tertutup kepada para kader komisi penanggulangan aids tidak terbuka tentang apa keluhan yang bisa di bantu oleh para petugas dan kader dari komisi penanggulangan aids. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah Komisi penanggulangan aids berusaha mencari kader kader penjangkau dari populasi kunci untuk dapat masuk ke lingkungan mereka

dan populasi umum untuk memberitahu kepada masyarakat secara luas dan melakukan sosialisasi tentang penanggulangan Hiv/Aids dan juga bekerjasama dengan pemerintah agar dapat mengefisienkan anggaran yang ada, kami melakukan diskusi dan pendekatan dengan para pengidap agar mau berobat pihak Komisi Penanggulangan AIDS dan juga kader juga selalu melakukan kunjungan rutin terhadap mereka dan membantu mereka dalam mengatasi permasalahan yang merka hadapi terutama dalam pengobatan mereka.

Kata Kunci: Kinerja, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang diwujudkan melalui perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah dengan upaya pemberian fasilitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Karena itu, kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Rendahnya pemahaman seseorang akan pentingnya kesehatan bagi dirinya sendiri membuat mereka memandang sebelah mata akan adanya permasalahan kesehatan di lingkungan sekeliling mereka. Negara Indonesia hingga saat ini masih menghadapi problematika kesehatan yang memberikan dampak sosial yang kompleks dan menjadi kendala pembangunan yang harus segera diselesaikan. Masalah kesehatan yang masih mengkhawatirkan yang ada di Indonesia bahkan negara-negara lain di dunia adalah fakta berkembangnya epidemi yang disebabkan Human

Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS). HIV dan AIDS adalah dua istilah berbeda tetapi saling berhubungan. HIV adalah virus yang menyebabkan terjadinya AIDS. Sedangkan 'tahap AIDS' adalah situasi dimana seseorang telah benar-benar menurun daya tahan tubuhnya dan telah terinfeksi 2 penyakit penyakit penyerta atau sering disebut infeksi oportunistik. AIDS merupakan penyakit yang paling ditakuti pada saat ini. HIV virus yang menyebabkan penyakit ini, merusak sistem pertahanan tubuh (sistem imun), sehingga orang-orang yang menderita penyakit ini kemampuan untuk mempertahankan dirinya dari serangan penyakit menjadi berkurang. Seseorang yang positif mengidap HIV, belum tentu mengidap AIDS. Banyak kasus di mana seseorang positif mengidap HIV, tetapi tidak menjadi sakit dalam jangka waktu yang lama. Namun, HIV yang ada pada tubuh seseorang akan terus merusak sistem imun. Akibatnya, virus, jamur dan bakteri yang biasanya tidak berbahaya menjadi sangat berbahaya karena rusaknya sistem imun tubuh. Virus tersebut masih belum ditemukan

vaksin atau obat untuk menyembuhkan epidemi sehingga HIV/AIDS menjadi fokus perhatian dunia sampai saat ini. Epidemik HIV /AIDS adalah sebuah fakta yang sekarang sedang dihadapi di semua daerah-daerah di Indonesia. Epidemi dari HIV /AIDS masih dinamis sehingga jalur penyebarannya masih belum diramalkan. HIV/AIDS merupakan permasalahan ekstrim yang secara mudah berpindah sehingga secara geografis dan sosial tidak tetap, kasus HIV-AIDS pertama kali ditemukan di Bali pada tahun 1987, jumlah kasus terus bertambah dan menyebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Data tentang jumlah sebenarnya orang hidup dengan HIV-AIDS (ODHA) di Indonesia sulit untuk didapat. Seringkali dikemukakan bahwa jumlah penderita yang berhasil 3 dihimpun hanyalah puncak dari sebuah gunung es yang di bawahnya menyimpan petaka yang mengerikan. setiap kasus yang dilaporkan diperkirakan ada 100 orang lainnya yang sudah terinfeksi HIV, namun tidak terdeteksi.

Di zaman sekarang khususnya di era modern banyak hal yang berubah, perilaku menyimpang merupakan contoh kecil dari sekian banyak akibatnya. Pengaruh dari semakin modernnya zaman tidak dapat terbendung lagi, baik dari media komunikasi maupun pergaulan yang tersalurkan tanpa batas dan tanpa adanya pengawasan. Oleh karena itu maka terjadilah perilaku menyimpang

atau tingkah laku hingga pelanggaran norma sosial sudah marak terjadi baik didaerah-daerah hingga kota besar di Indonesia.

Perilaku menyimpang dapat juga diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada didalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat.

Lingkungan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tumbuhnya perilaku menyimpang. Karena bagaimana juga baik buruknya perilaku seseorang tidak terlepas dari pengaruh pergaulan dan lingkungan. Selain itu, penyebab dari perilaku menyimpang dikarenakan ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan.

Bentuk dari perilaku menyimpang itu sendiri dapat berupa kejahatan, perilaku seksual, penyimpangan gaya hidup maupun penyimpangan pemakaian berlebihan seperti pemakaian narkoba. Perilaku menyimpang tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku menyimpang berupa perilaku seksual dan pemakaian narkoba juga dapat menyebabkan seseorang menderita penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS (*Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome*)

merupakan penyakit infeksi yang sangat berbahaya karena tidak saja membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia namun juga pada negara secara keseluruhan. Sesuai dengan sejarah yang telah ditulis, kasus HIV/AIDS pertama kali dilaporkan berasal dari Los Angeles, Amerika Serikat, pada 5 Juni 1981.

Menurut D Rokhman, (2015) menyatakan bahwa berdasarkan proyeksi penyebab kematian penduduk dunia tahun 2030, secara umum kematian akibat penyakit menular semakin menurun, tetapi kematian karena HIV/AIDS terus meningkat. Seberapa besar peningkatannya sangat tergantung pada seberapa besar peningkatan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS yang dilakukan. Strategi pencegahan HIV/AIDS yang efektif bisa dilakukan apabila faktor risiko utama penularan HIV/AIDS telah diidentifikasi dengan baik. Perilaku-perilaku yang berisiko menularkan HIV/AIDS menurut D. Rokhman, 2015 adalah 1) Menggunakan jarum dan peralatan yang tercemar HIV, 2) Mengidap penyakit/ infeksi menular seksual, 3) Berhubungan seks melalui anus, 4) Pekerja Seks Komersial, 5) Hubungan seksual berganti-gantipasaran.

Pemerintah Indonesia juga berusaha menekan angka HIV/AIDS dengan mengeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan Aids. Wanita usia 15 tahun keatas yang hidup dengan

kondisi HIV sekitar 250 ribu jiwa. Peran Komisi Penanggulangan Aids (KPA) dalam penanggulangan HIV & AIDS merupakan salah satu sarana dalam rangka upaya pengobatan atau rehabilitasi.

Upaya ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kematian di Kota Banjar yang disebabkan oleh penyakit HIV & AIDS. KPA dalam menjalankan fungsinya harus berdasar pada beberapa prinsip dasar penanggulangan HIV & AIDS, yaitu : Pertama, upaya penanggulangan HIV & AIDS dilaksanakan secara bersama dan oleh masyarakat beserta pemerintah. Kedua, setiap upaya penanggulangan HIV & AIDS harus mencerminkan nilai agama dan budaya yang dianut dan berkembang dalam tatanan masyarakat Indonesia. Ketiga, setiap kegiatan dibuat serta diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta sistem dukungan sosial yang mengakar pada masyarakat Indonesia. Keempat, pencegahan HIV & AIDS diarahkan pada upaya preventif dengan melakukan pendidikan serta penyuluhan untuk memantapkan perilaku masyarakat yang baik dan mengubah perilaku masyarakat yang rentan serta berisiko tinggi terhadap perkembangan HIV & AIDS.

Kendala yang dihadapi KPA Kota Banjar seperti halnya alat CD4 yang merupakan alat untuk menentukan berapa sistem kekebalan tubuh seseorang, dan *Viral Load (VL)* atau alat untuk mengetahui

seberapa jauh dan berkembang virus di dalam tubuh melalui sampel darah, RSUD Kota Banjar belum memilikinya. Karena itu, berbagai permasalahan yang ada harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara intens agar dalam menangani HIV di Kota Banjar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Tantangan terbesar bagi pemerintah maupun pegiat HIV adalah bagaimana memberikan penyadaran kepada ODHA agar mereka mau berobat. Lantaran terbentur stigma, membuat sebagian dari mereka enggan berobat, yang pada akhirnya juga membahayakan diri sendiri.

Begitupun hasil dari pengamatan yang dilakukan pada kantor KPA Kota Banjar di peroleh adanya gambaran tentang hasil dari pelaksanaan peran satuan tugas Komisi Penanggulangan Aids yang belum terlaksana dengan baik, hal itu bisa di lihat dari adanya beberapa indikator permasalahan berikut:

1. Kurang gencarnya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahayanya HIV/Aids serta cara pencegahannya. Hal ini terbukti dengan kurangnya informasi tentang bahaya HIV/Aids yang di ketahui oleh masyarakat.
2. Adanya sebagian orang yang berperilaku menyimpang. Contohnya masih adanya sebagian orang yang berperilaku homo seksual atau yang di kenal dengan hubungan sesama jenis. Hal ini

terbukti dengan adanya komunitas LSL per September 2021 ada 348 orang.

Berdasarkan uraian diatas selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana peran Satgas Komisi Penanggulangan Aids dalam upaya pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di Kecamatan Banjar Kota Banjar?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian peran

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah sebuah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Budiarto, R. A., & Taher, A. (2018) menyatakan bahwa dalam teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori,

orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002).

Menurut Suhardono (2016:11) menyatakan bahwa “peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang di bawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisinya yang didudukinya tersebut.”

Menurut Schooler (dalam Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1984:118), peran yang berkaitan dengan pekerjaan akan menimbulkan perubahan kepribadian, sehingga terdapat pengaruh timbal balik dari manusia terhadap pekerjaan dan dari pekerjaan terhadap manusia.

Penanggulangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara perbuatan menanggulangi. Penanggulangan HIV / AIDS merupakan upaya terpadu dari peningkatan perilaku hidup sehat (promotif), pencegahan penyakit HIV / AIDS (preventif), serta pengobatan dan perawatan (kuratif) dan dukungan hidup (support) terhadap pengidap penyakit HIV / AIDS. Upaya preventif dan promotif merupakan upaya prioritas yang diselenggarakan secara berimbang dengan upaya kuratif dan

dukungan terhadap pengidap penyakit HIV / AIDS.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)

Salah satu virus yang menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 yaitu Human Immunodeficiency Virus (HIV), virus tersebut dapat menyebabkan AIDS dalam rentang waktu tertentu dapat merusak sistem kekebalan tubuh pada manusia. Infeksi oportunistik yang menyertai dapat menjadi manifestasi klinis yang terlihat. Menurunnya imun tubuh terjadi karena melemahnya kekebalan tubuh akibat infeksi HIV sehingga dapat terjadi infeksi oportunistik (Sudikno, Bona Simanungkalit 2011). AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) yang terjadi akibat efek dari perkembang biakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup, kondisi dimana tubuh sudah diserang sepenuhnya/ sudah tidak mempunyai kekebalan tubuh lagi. Jadi ketika tubuh sakit tidak bisa sembuh dengan kekebalan sendiri. HIV hidup didalam darah dan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Cairan yang bisa mengeluarkan HIV itu dari cairan darah, dinding anus, ASI, sperma dan cairan vagina termasuk darah menstruasi. Sedangkan penularan dapat terjadi melalui: hubungan sek bebas/seks yang tanpa menggunakan pengaman dengan orang yang terinfeksi HIV, jarum suntik atau tindik dan bisa melalui tato yang tidak steril dan dipakai secara bergantian, dapat juga melalui transfusi darah yang

mengandung virus HIV, ibu 8 penderita HIV positif saat proses persalinan atau melalui Air Susu Ibu (ASI) yang diberikan (Jambak, Nur Ainun, Wiwit Febrina 2016). Menurut Green, cw (2007) disebut human (manusia) karena virus ini hanya dapat menginfeksi manusia, immune-deficiency karena efek virus ini adalah melemahkan kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan segala penyakit yang menyerang tubuh, termasuk golongan virus karena salah satu karakteristiknya adalah tidak mampu memproduksi diri sendiri, melainkan memanfaatkan sel-sel tubuh. Sel darah putih manusia sebagai sel yang berfungsi untuk mengendalikan atau mencegah infeksi oleh virus, bakteri, jamur, parasite, dan beberapa jenis kanker diserang oleh HIV yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit.

AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Virus*)

AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah suatu kumpulan gejala yang muncul ketika stadium infeksi HIV sudah sangat parah.

Biasanya, kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit kronis

lain, seperti kanker dan berbagai infeksi oportunistik yang muncul seiring dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh.

Sederhananya, infeksi HIV adalah kondisi yang bisa menyebabkan penyakit AIDS.

Jika infeksi virus ini dalam jangka panjang tidak diobati dengan tepat, Anda akan berisiko lebih tinggi mengalami AIDS.

Dewa Putu Yudi Pradita (2014:19) Adapun ancaman terbesar saat ini yang dihadapi khususnya oleh Indonesia adalah HIV dan AIDS merupakan singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* disingkat (AIDS) adalah suatu sekumpulan gejala yang ditimbulkan oleh virus kekebalan tubuh manusia. Virus tersebut dinamakan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).

Komisi Penanggulangan Aids

Komisi Penanggulangan AIDS atau Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) adalah sebuah lembaga negara nonstruktural dan independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS di Indonesia. Sejarah Komisi penanggulangan Aids Kasus HIV/AIDS pertama di Indonesia ditemukan di Bali pada tahun 1987. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui diadakannya strategi khusus untuk mencegah dan menanggulangi AIDS di seluruh dunia.

Departemen Kesehatan Indonesia saat itu kemudian membentuk panitia khusus untuk menanggulangi AIDS serta menyelenggarakan pendataan orang dengan HIV/AIDS melalui beberapa peraturan tahun 1988 dan 1989. KPAN pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 36/1994 sebagai Komisi Penanggulangan AIDS. Pada tahun 2006, Komisi Penanggulangan AIDS diubah menjadi Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melalui Peraturan Presiden 75/2006 bersamaan dengan dibentuknya Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Aktivitas Peraturan tahun 2006 menugaskan KPAN antara lain untuk membentuk dan mengkoordinasikan kebijakan dan rencana kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS di Indonesia serta melakukan sosialisasi AIDS pada media massa dan mengadakan kerjasama antardaerah dan internasional dalam mencegah dan menanggulangi AIDS. Pelaksanaan tugas KPAN juga dibantu oleh kelompok kerja dan panel ahli. KPAN juga bekerja dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional dalam melaksanakan kegiatannya. Selain itu, KPAN juga memberikan dukungan untuk penelitian-penelitian akademik terkait HIV/AIDS dan menerbitkan laporan berkala tentang kegiatannya.

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan

penanggulangan AIDS perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan penanggulangan AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, politik, dan ekonomi maka Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan suatu kebijakan berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Maksud dan Tujuan Komisi Penanggulangan Aids

Maksud dan tujuan di bentuknya Komisi Penanggulangan Aids Kota Banjar sesuai dengan peraturan wali Kota Banjar nomer 18 tahun 2018 yang terdapat dalam Bab II (pasal 2)

1. Maksud di laksanakannya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yaitu untuk menekan laju epidemic HIV dan AIDS pada populasi kunci dan populasi umum, melalui penyediaan dan penyebar luasan informasi serta menciptakan suasana kondusif, penyediaan pelayanan perawatan. Dukungan dan pengobatan kepada ODHA secara komprehensif, dengan meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan kemitraaan.
2. Tujuan pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:
 - a. Pengaturan strategi pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS
 - b. Peningkatan upaya pencegahan pada populasi kunci, populasi

- umum, dan di pelayanan kesehatan
- c. Peningkatan dan penyediaan pelayanan konseling dan tes HIV
 - d. Peningkatan kualitas hidup ODHA melalui perawatan, dukungan dan pengobatan
 - e. Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta pengurangan dampak HIV dan AIDS pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak HIV.
 - f. Peningkatan peran masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - g. Peningkatan kemitraan di antara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan, dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

METODE

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007:248) analisis data kualitatif adalah: Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam metode penelitian ini walaupun peneliti belum memiliki masalah tapi peneliti dapat memasuki obyek/lapangan. Setelah memasuki obyek, peneliti akan melihat segala sesuatu yang ada didalam tempat itu secara umum.

Ada 4 tahapan dalam proses pengumpulan data setelah peneliti memasuki objek penelitian atau situasi sosial (tempat, pelaku/aktivitas).

1. Peneliti berfikir apa yang akan ditanyakan.
2. Bertanya pada orang yang dijumpai pada tempat tersebut.
3. Menganalisis apakah jawaban yang diberikan benar atau tidak.
4. Apabila jawabannya benar maka dibuat kesimpulan.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan data dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Studi Lapangan, adalah teknik mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan cara :
3. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian.
4. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kecamatan Banjar

Komisi Penanggulangan Aids atau Komisi penanggulangan aids nasional adalah sebuah lembaga Negara nonstruktural dan independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan pengendalian dan penanggulangan AIDS di Indonesia. Didirikan pada tahun 1994.

Pemerintah Indonesia juga berusaha menekan angka HIV/Aids dengan mengeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan Aids. Wanita usia 15 tahun keatas yang hidup dengan kondisi HIV sekitar 250 ribu jiwa. Peran Komisi Penanggulangan Aids (KPA) dalam penanggulangan HIV & AIDS merupakan salah satu sarana

dalam rangka upaya pengobatan atau rehabilitasi.

Upaya ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kematian di Kota Banjar yang disebabkan oleh penyakit HIV & AIDS. KPA dalam menjalankan fungsinya harus berdasar pada beberapa prinsip dasar penanggulangan HIV & AIDS, yaitu : Pertama, upaya penanggulangan HIV & AIDS dilaksanakan secara bersama dari dan oleh masyarakat beserta pemerintah. Kedua, setiap upaya penanggulangan HIV & AIDS harus mencerminkan nilai agama dan budaya yang dianut dan berkembang dalam tatanan masyarakat Indonesia. Ketiga, setiap kegiatan dibuat serta diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta sistem dukungan sosial yang mengakar pada masyarakat Indonesia. Keempat, pencegahan HIV & AIDS diarahkan pada upaya preventif dengan melakukan pendidikan serta penyuluhan untuk memantapkan perilaku masyarakat yang baik dan mengubah perilaku masyarakat yang rentan serta berisiko tinggi terhadap perkembangan HIV & AIDS.

Maksud Dan Tujuan Komisi Penanggulangan Aids Kota Banjar

Maksud dilaksanakannya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yaitu untuk menekan laju epidemic HIV dan AIDS pada populasi kunci dan populasi umum, melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi serta menciptakan suasana kondusif, penyediaan pelayanan

perawatan, dukungan dan pengobatan kepada ODHA secara komprehensif, dengan meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan kemitraan.

Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

1. Pengaturan strategi pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS.
2. Peningkatan upaya pencegahan pada populasi kunci, populasi umum, dan di pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan penyediaan pelayanan konseling dan tes HIV.
4. Peningkatan kualitas hidup ODHA melalui perawatan, dukungan dan pengobatan.
5. Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta pengurangan dampak HIV dan AIDS pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak HIV.
6. Peningkatan peran masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
7. Peningkatan kemitraan diantara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan, dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini berawal dari adanya permasalahan terkait adanya permasalahan dalam upaya pencegahan

dan penyebaran virus Hiv/Aids di kota banjar oleh Komisi Penanggulangan Aids Kota Banjar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Soekanto (2009:212-213) yang menyebutkan peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Berdasarkan teori di atas maka sudah jelas bahwa Peran Satuan tugas Komisi Penanggulangan Aids dalam upaya untuk mencegah dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahayanya virus Hiv/Aids merupakan kajian ilmu pemerintahan. Dimana Komisi Penanggulang Aids masih di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Banjar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya pencegahan dan penyebaran virus Hiv/Aids dalam hal ini khususnya untuk pengetahuan dan pemahaman masyarakat di kota Banjar.

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional variabelnya adalah Peran. Beberapa dimensi peran yaitu sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan.
Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan,
2. Peran sebagai strategi.
Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkn dukungan dari masyarakat (*public support*),
3. Peran sebagai alat komunikasi.
Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang *responsif* dan *responsible*,
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.
Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah

bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

5. Peran sebagai terapi.

Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoeputri, Arimbi dan Santosa, 2003

Dalam rangka penanggulangan aids maka peran dapat dikategorikan sebagai upaya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Untuk mengetahui bagaimana peran satgas komisi penanggulangan aids di wilayah Kecamatan banjar Kota Banjar, maka dilakukan penelitian melalui wawancara dengan 2 orang satgas komisi penanggulangan aids, 3 orang pengidap aids dan 2 orang masyarakat. Hasil wawancara tampak sebagaimana di deskripsikan berikut ini.

1. Peran Sebagai Suatu Kebijakan **a. Adanya Suatu Kebijakan Yang Jelas Dan Di Ketahui Oleh Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di nyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan program kegiatan penanggulangan aids, komisi penanggulangan aids sudah memiliki kebijakan yang jelas.

Sementara itu hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti peran ini cukup dilakukan dengan optimal hal ini diperkuat dengan keluarnya atau adanya peraturan Walikota Banjar No 18 tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan hiv aids di Kota Banjar dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 21 tahun 2013 tentang penanggulangan dan pencegahan hiv/Aids menunjukkan bahwa orang yang mengidap virus tersebut dan masyarakat belum semuanya mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini penulis melakukan wawancara dengan pengelola program komisi penanggulangan aids mengenai hambatan tersebut. Adapun hasilnya adalah belum adanya kader penjangkau dari pengidap virus tersebut sehingga kebijakan ini masih belum diketahui oleh masyarakat luas secara luas.

Selain itu penulis juga menanyakan tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dengan hasil sebagai berikut. Komisi penanggulangan aids berusaha mencari kader kader penjangkau dari populasi kunci dan populasi umum untuk memberitahu dan melakukan sosialisasi tentang kebijakan tersebut.

b. Adanya Sosialisasi Kebijakan Tentang Bagaimana Penanggulangan Hiv/Aids.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam rangka sosialisasi kebijakan mengenai

cara penanggulangan aids pihak komisi penanggulangan aids melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan ke sekolah-sekolah di kecamatan banjar .

Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di tunjukan dengan adanya pihak Komisi Penanggulangan Aids sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sosialisasi kebijakan tersebut, namun berdasarkan wawancara terhadap masyarakat dan pengidap belum begitu mengetahui tentang sosialisasi tersebut.

Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini penulis melakukan wawancara dengan pengelola program komisi penanggulangan aids mengenai hambatan tersebut. Adapun hasilnya adalah adanya hambatan dalam masalah anggaran apalagi di dua tahun terakhir karna anggaran di potong oleh anggaran covid, tidak adanya kader penjangkau, ketidak keterbukaan orang orang yang terkena virus tersebut.

Selain itu penulis juga menanyakan tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dengan hasil sebagai berikut. Komisi penanggulangan aids mencari kader kader penjangkau untuk dapat masuk ke lingkungan mereka.

2. Peran Sebagai Strategi

a. Adanya Cara Atau Strategi Dalam Implementasi Kebijakan Terhadap Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan strategi dan

mengimplementasikan kebijakan penanggulangan aids, komisi penanggulangan aids sudah memiliki strategi yang cukup baik.

Sementara itu hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti peran ini dilaksanakan cukup optimal hal ini di tunjukan dengan adanya pertemuan pertemuan dengan kader kader penjaungkau untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian maka jelas bahwa pelaksanaan indikator ini telah di laksanakan sesuai ketentuan.

Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan indikator ini penulis melakukan wawancara dengan pengelola program komisi penanggulangan aids mengenai hambatan tersebut. Adapun hasilnya adalah tidak terlalu adanya hambatan yang begitu berarti.

b. Memiliki Rencana Kerja Komisi Penanggulangan AIDS

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di nyatakan bahwa Komisi Penanggulangan Aids sudah memiliki rencana kerja yang jelas dan baik.

Sementara itu hasil dari observasi menunjukan bahwa pihak Komisi Penanggulangan Aids menjalankan rencana kerja dengan baik di tunjukan dengan adanya kunjungan rutin kepada para pengidap dan juga melakukan sosialisasi tentang hiv dan aids kepada warga masyarakat.

Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan indikator ini penulis melakukan wawancara dengan pengelola program

komisi penanggulangan aids mengenai hambatan tersebut. Adapun hasilnya adalah tidak adanya hambatan yang terlalu sulit.

3. Peran Sebagai Alat Komunikasi

a. Adanya Komunikasi Antara Pihak Komisi Penanggulangan Aids Dengan Pihak Pemerintah Secara Berkesinambungan Demi Tercapainya Tujuan Bersama.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di nyatakan bahwa adanya komunikasi antara pihak Komisi Penanggulangan Aids dengan pihak Pemerintah setempat.

Sementara itu hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa hubungan komunikasi antara Komisi Penanggulangan Aids dengan pemerintah sudah terjalin dengan baik di tunjukan dengan adanya rapat rapat dengan organisasi perangkat daerah dan juga pihak pemerintah untuk dapat mecegah dan menurunkan angka penyebaran virus hiv/aids di kota Banjar dan juga pembahasan anggaran untuk upaya pencegahan dan penularan hiv dan aids.

Dengan demikian maka jelas bahwa pelaksanaan indikator ini telah di laksanakan sesuai ketentuan.

Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan indikator ini penulis melakukan wawancara dengan pengelola program komisi penanggulangan aids mengenai hambatan tersebut. Adapun hasilnya adalah tidak adanya hambatan karna

hubungan kami sudah terjalin dengan baik

4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

a. Adanya Penilaian Dari Dua Sisi

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di nyatakan bahwa pihak Komisi Penanggulangan Aids sudah melaksanakan peranya sebagai alat penyelesaian sengketa.

Sementara itu hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti peran ini cukup dilaksanakan dengan baik hal itu di tunjukan dengan bahwa pihak Komisi Penanggulangan Aids melakukan selalu memberikan penyuluhan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tidak terjadi diskriminasi terhadap orang-orang yang terkena virus HIV/AIDS. Dan juga selalu mengajak masyarakat untuk memberikan semangat kepada mereka agar tidak berputus asa.

Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan indikator ini penulis melakukan wawancara dengan pengelola program komisi penanggulangan aids mengenai hambatan tersebut. Tidak ditemukan hambatan yang begitu berarti di masyarakat.

b. Adanya Pencegahan Konflik

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di nyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan komisi penanggulangan aids sebagai alat penyelesaian sengketa, komisi penanggulangan aids sudah menjalankan perannya dengan baik.

Sementara itu hasil dari observasi yang di lakukan oleh peneliti menunjukan bahwa jarang di temukannya konflik di masyarakat antara orang dengan HIV/AIDS dan warga lingkungan sekitar tempat mereka tinggal karena orang dengan HIV/AIDS jarang bergaul dengan masyarakat karena mereka merasa malu dengan penyakit yang di deritanya. Dengan demikian maka jelas bahwa pelaksanaan indikator ini telah di laksanakan sesuai ketentuan.

Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan indikator ini penulis melakukan wawancara dengan pengelola program komisi penanggulangan aids mengenai hambatan tersebut. Adapun hasilnya tidak adanya hambatan yang di temui dilapangan jarang adanya konflik antara pengidap dengan masyarakat.

Selain itu penulis juga menanyakan tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dengan hasil sebagai berikut. Tidak ada karena masyarakat cenderung acuh dengan orang yang terkena virus tersebut.

5. Peran Sebagai Terapi

a. Adanya Pihak Ke Tiga Yang Memberikan Motivasi Penyembuhan

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di nyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pemberian motivasi terhadap para pengidap dilakukan oleh Komisi Penanggulangan Aids maupun para pihak ketiga yang terdiri dari para

kader maupun lsm peduli aids sudah berperan dengan baik

Sementara itu hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa memang adanya pihak ke tiga yang memberikan motivasi penyembuhan terhadap para pengidap hal tersebut di tunjukan dengan adanya sebuah kerja sama antara pihak komisi penanggulangan aids dengan para kader dan juga warga peduli aids maupun Lsm peduli aids untuk mendampingi mereka dalam hal pengobatan.

Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan indikator ini penulis melakukan wawancara dengan pengelola program komisi penanggulangan aids mengenai hambatan tersebut. Adapun hasilnya adalah “Para pengidap cenderung acuh dan tertutup kepada para kader, kita juga terkendala dengan biaya anggaran dalam pengobatan untuk mereka melakukan test dan juga pengecekan darah.

Selain itu penulis juga menanyakan tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dengan hasil sebagai berikut.”kami melakukan diskusi dan pendekatan dengan para pengidap agar mau berobat.

b. Adanya Kerjasama Mengenai Pengobatan Atau Rehabilitasi

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di nyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pengobatan maupun rehabilitasi, komisi penanggulangan aids sudah

berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, dinas kesehatan dan di bantu dengan LSM peduli aids.

Sementara itu hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa para pengidap sangat di bantu oleh pihak Komisi Penanggulangan Aids dalam proses pengobatan atau rehabilitasi hal itu di tunjukan dengan adanya pelayanan konseling, pelayanan kesehatan, penebusan resep obat di ruangan soka Blud Rsud dan juga pelayanan konseling dan pengobatan di laboratorium swasta dan juga test Hiv di lakukan secara rahasia sesuai dengan ketentuan maupun Sop yang berlaku.

Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan indikator ini penulis melakukan wawancara dengan pengelola program komisi penanggulangan aids mengenai hambatan tersebut. Adapun hasilnya adalah “ hanya adanya biaya admin untuk pengobatan di rumah sakit yang harus di bayar oleh pengidap.

Selain itu penulis juga menanyakan tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dengan hasil sebagai berikut. “pihak Komisi Penanggulangan AIDS dan juga kader selalu melakukan kunjungan rutin terhadap mereka dan membantu mereka dalam mengatasi permasalahan yang merka hadapi”.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas maka di temukan beberapa hal sebagai berikut:

Dari lima dimensi mengenai pelaksanaan peran menurut Peran

menurut Soekanto (2009:212-213). Yang terdiri dari Dimensi Peran sebagai suatu kebijakan, Peran sebagai strategi, Peran sebagai alat komunikasi, Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, Peran sebagai terapi.

Dari kelima dimensi tersebut dibagi menjadi sepuluh indikator dan terdapat dua indikator yang belum maksimal dalam melaksanakan perannya yaitu : 1. Sosialisasi kebijakan dalam penanggulangan Hiv/Aids. 2. Cara untuk merangkul orang dengan hiv aids dalam memberikan terapi dan pengobatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dapat disimpulkan bahwa :

Peran Satuan Tugas Komisi Penanggulangan *Aids* belum berjalan secara optimal. Berdasarkan dari Lima dimensi mengenai peran satuan tugas komisi penanggulangan aids menurut Soekanto (2009:212-213) terdiri dari Peran sebagai suatu kebijakan, Peran sebagai strategi, Peran sebagai alat komunikasi, Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, Peran sebagai terapi. Terdapat 2 dimensi yang belum berjalan dengan baik yaitu dimensi peran sebagai suatu kebijakan dan peran sebagai terapi.

Selanjutnya hambatan yang ditemui adalah masih kurangnya sosialisasi kebijakan tentang penanggulangan Hiv/Aids terhadap masyarakat karena terkendala anggaran apalagi di dua tahun terakhir, para

pengidap cenderung acuh dan tertutup kepada para kader komisi penanggulangan aids tidak terbuka tentang apa keluhan yang bisa di bantu oleh para petugas dan kader dari komisi penanggulangan aids.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah Komisi penanggulangan aids berusaha mencari kader kader penjangkau dari populasi kunci untuk dapat masuk ke lingkungan mereka dan populasi umum untuk memberitahu kepada masyarakat secara luas dan melakukan sosialisasi tentang penanggulangan Hiv/Aids dan juga bekerja sama dengan pemerintah agar dapat mengefisienkan anggaran yang ada, kami melakukan diskusi dan pendekatan dengan para pengidap agar mau berobat pihak Komisi Penanggulangan AIDS dan juga kader juga selalu melakukan kunjungan rutin terhadap mereka dan membantu mereka dalam mengatasi permasalahan yang merka hadapi terutama dalam pengobatan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Adisaputro, Gunawan, 2010. *Manajemen Pemasaran 8 (Analisis Untuk Perencanaan Strategi Pemasaran)*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik : Paradigma Teori Aplikasi Strategi dan Komunikasi*

- Politik Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Berry, David, 2003 *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Depok : Rajawali Pers.
- Fisher, S. 2001. *Mengelola Konflik : Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta : The British Council
- Hasibuan, Malayu S.P 2007. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- H. Rahardjo Adisasmita, 2005. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*, Graha Ilmu : Yogyakarta
- Iqbal Hasan, 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistic*. Jakarta : Bumi Aksara
- James A Black, Dean J Champion. 2001. *Methods And Issues In Sosial Research (Metode Dan Masalah Penelitian Sosial)*. Bandung : Refika Aditama Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rukiyati, Dkk. 2004. *Penanaman Nilai Karakter Tanggung Jawab dan Kerjasama Terintegrasi dalam Perkuliahan Ilmu Pendidikan*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada
- Sugiono, 2009 . *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta : Bandung.
- Perundang-undangan:**
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
- Peraturan Wali Kota Banjar No 18 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Hiv/Aids.